

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Pemikiran tentang pembangunan selalu berhadapan dengan persoalan mengenai prioritas antara pertumbuhan ekonomi atau kebebasan (demokrasi). Apakah kebebasan menjadi tuntutan yang akan dipenuhi setelah tercapainya pertumbuhan ekonomi? Kalau kebebasan diprioritaskan, sejauh mana peran kebebasan dalam pembangunan secara keseluruhan?

Dalam perdebatan yang kontroversial tentang peranan nilai-nilai Asia pada akhir tahun 1980-an hingga pertengahan tahun 1990-an, para diktator pembangunan di Asia berpandangan bahwa tuntutan kebebasan atau demokrasi tidak relevan dalam pembangunan ekonomi. Para diktator tersebut meliputi Lee Kuan Yew (Singapura), Mahathir bin Mohamad (Malaysia), dan Soeharto (Indonesia), yang menegaskan bahwa tuntutan kebebasan dalam konteks Asia merupakan sesuatu yang kontraproduktif. Bagi mereka pembangunan ekonomi tidak dapat berjalan bersamaan dengan tuntutan demokrasi dan hak asasi manusia. Pertumbuhan demokrasi akan dengan sendirinya muncul jika pertumbuhan ekonomi mencapai tahapan yang memungkinkan terjaminnya kebutuhan dasar rakyat banyak.

Bertentangan dengan itu, sosiolog Peter L. Berger memberi kritik tajam terhadap paradigma pertumbuhan sebagai sebuah mitos, sebab paradigma pertumbuhan beroperasi di atas ketidakpastian. Menurut Berger, kelemahan mendasar mitos pertumbuhan ekonomi dalam kapitalisme terletak dalam kebijaksanaan-kebijaksanaan politik yang menyetujui penderitaan pada waktu sekarang demi janji kemakmuran di masa depan. Berlawanan dengan pandangan para diktator, Amartya Sen, salah satu cendekiawan Asia berpandangan bahwa

perluasan kebebasan dalam pelbagai dimensi ekonomi, sosial, dan politik merupakan tujuan utama dan sekaligus sarana penting bagi pembangunan. Menurut Sen, ide demokrasi telah berakar dalam tradisi Asia, karena itu dia harus diterima sebagai nilai universal.

Di Indonesia juga, cendekiawan seperti Soedjatmoko berpandangan tidak jauh berbeda dengan Amartya Sen. Menurut Soedjatmoko, dalam pembangunan, kebebasan menjadi faktor yang mutlak harus beriringan dalam mekanisme pembangunan. Tanpa kebebasan, berbagai ancaman akan mendera eksistensi manusia dari berbagai aspek. Dengan kata lain, menurut Soedjatmoko, upaya untuk menciptakan kebebasan adalah upaya untuk meniadakan berbagai ancaman yang menimbulkan penderitaan. Kebebasan memungkinkan terpenuhinya dan terlaksananya kebutuhan-kebutuhan dalam aspek lain. Dalam kebebasan, manusia memperoleh keleluasaan untuk berekspresi dan menunjang berbagai kebutuhan hidupnya dalam ruang yang dipercayakan. Kebebasan berkaitan dengan nilai luhur martabat manusia.

Berdasarkan seluruh uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya mengenai pemikiran Soedjatmoko, penulis sampai pada kesimpulan berikut. *Pertama*, pembangunan merupakan usaha revitalisasi struktural dan materi maupun kehidupan batiniah manusia yang dalam implementasinya tetap mengutamakan prioritas akan hak-hak, kebutuhan, dan pertumbuhan manusia yang terealisasi dalam penghormatan akan martabat manusia menuju sebuah kebebasan. Usaha pembangunan merupakan upaya memperbaiki berbagai ketimpangan dalam masyarakat yang menimbulkan kesengsaraan bagi masyarakat pada umumnya dan setiap individu khususnya. Ketimpangan ini bukan hanya pada tataran materi dan struktur, melainkan mencakup aspek batiniah manusia. Dengan demikian pembangunan menjadi upaya revitalisasi yang menyeluruh dalam setiap aspek kehidupan manusia. Aspek-aspek yang mendera kehidupan fisik maupun aspek yang mendera kehidupan batin manusia harus dihilangkan karena akan mengancam langsung manusia itu sendiri.

Kedua, dalam tujuan realisasinya, pembangunan harus pertama dan utama menysasar kepada orang-orang miskin, orang-orang pinggiran yang lebih rentan dan lebih urgen membutuhkan pembaharuan struktural maupun dalam materi

yang berupa penghampiran kebutuhan pokok dalam pemenuhan kebutuhan dasar mereka atau *Bottom – Up Approach*. Orang-orang kecil harus menjadi tolok ukur dari suksesnya sebuah pembangunan. Orang-orang kecil dan pinggiran adalah faktum yang menunjukkan bahwa pembangunan diciptakan terutama bagi mereka yang kecil karena terdesak akan kebutuhan pokok. Orang-orang kecil menjadi kaum yang lebih membutuhkan dalam skala prioritas pembangunan. Realisasi berbagai program dan kebijakan dari pembangunan harus pertama dan utama tertuju kepada kaum yang paling membutuhkan di samping mencapai sebuah proses pemerataan akan sumber daya dan pelayanan sosial, juga untuk menghindari adanya korban-korban manusia yang menderita. Sebuah aspek kemakmuran harus menyasar kepada kolektivitas masyarakat, sebelum tercapainya sebuah kesejahteraan bersama.

Ketiga, pembangunan menuju kebebasan adalah pembangunan yang diperjuangkan terus menerus, yang berjalan beriringan dengan perubahan kehidupan dan peradaban masyarakat tetapi tetap mengutamakan kebebasan masyarakat. Mekanisme pembangunan yang berjalan harus seiring dengan terpautnya kebebasan manusia dalam setiap pelaksanaannya. Berbagai perubahan situasi dan kondisi dalam masyarakat dalam proses pembangunan, tetap memperhatikan aspek kemanusiaan. Kebebasan manusia mesti berjalan seiring dengan proses pembangunan. Selain harus adaptif dalam berbagai prosesnya berhadapan dengan perubahan, pembangunan harus memperhatikan dan menyesuaikan dengan seluruh aspek yang menyangkut kebebasan manusia. Pada saat proses yang dinamis ini berjalan, usaha untuk mempertahankan kebebasan menjadi prioritas yang terus berlangsung.

Keempat, pembangunan menuju sebuah kebebasan membutuhkan intervensi secara komprehensif dari seluruh masyarakat, terutama untuk membangkitkan kesadaran akan situasi mereka agar dapat lebih produktif dalam usaha-usaha pembangunan. Terutama juga bagi kaum-kaum terpinggirkan yang harus disadarkan untuk bangkit dari keterpurukan yang mengungkung untuk mencapai kesejahteraan menuju kebebasan. Pembangunan menyeluruh dalam berbagai bidang kehidupan manusia merupakan upaya dan usaha yang kompleks. Kekompleksan ini menuntut intervensi dari seluruh elemen masyarakat untuk

terlibat langsung dalam pembangunan. Bagi masyarakat kecil, keterlibatan ini sekaligus menjadi momen penyampaian aspirasi-aspirasi untuk kepentingan berjalannya sebuah proses demokrasi yang nyata. Dengan demikian, keterlibatan masyarakat-masyarakat kecil ini menunjukkan tercapainya sebuah tujuan dari pembangunan yang komprehensif.

Bertolak dari berbagai pemikiran Soedjatmoko ini maka, disimpulkan bahwa pembangunan adalah proses peniadaan berbagai ancaman yang menimbulkan berbagai ketidakbebasan dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Pembangunan harus bertitik tolak terhadap kehidupan individu atau pun pribadi manusia untuk terhindar dari segala macam hal yang mengancam kebebasan dan otonomi manusia. Ancaman-ancaman itu berasal dari berbagai aspek kehidupan manusia. Terdapat beberapa ancaman terhadap kebebasan dan otonomi manusia.

Pertama, Kapitalisme sebagai model pembangunan ekonomi era Orde Baru. Kondisi ketidakbebasan hadir pada masa Orde Baru dalam praktik pembangunan ekonomi yang melahirkan berbagai situasi ketidakbebasan. Banyak sekali yang menderita akibat langgengnya praktik kapitalis dalam masa Orde Baru. Orientasi terhadap pertumbuhan ekonomi menimbulkan berbagai ketidakadilan bahkan terdapat banyak biaya manusiawi yang dikorbankan. Dengan adanya sebuah mitos pertumbuhan, masyarakat berekspektasi memiliki masa depan yang menjanjikan, setidaknya yang miskin menjadi lebih kaya. Namun, politik pembangunan dengan orientasi pada pertumbuhan ekonomi ini, dalam realitasnya tidak menyebabkan kesejahteraan dan pemerataan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Malah akibatnya, jurang antara masyarakat miskin dan masyarakat kaya menjadi sangat lebar. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada Orde Baru atau dalam proses pembangunan rezim Soeharto, didasarkan pada perembesan perekonomian modal asing.

Kedua, praktik politik otoritarianisme masa Orde Baru. Terdapat beberapa kebijakan Soeharto yang menunjukkan sebuah otoritarianisme dan pengabaian terhadap demokrasi, yakni pembungkaman hak-hak politik sipil dan hak berdemokrasi masyarakat serta adanya kebijakan yang didukung oleh kekuatan militer yang bertendensi melahirkan tindakan kekerasan. Selain itu, rezim Orde Baru juga menimbulkan berbagai penyelewengan dalam praktik politik yang

dibuatnya. Berbagai macam tindakan yang tidak manusiawi dibiarkan terjadi sehingga banyak korban nyawa berjatuhan.

Ketiga, agama dalam pembangunan. Kehadiran agama memberikan corak tersendiri bagi kebebasan dalam kehidupan masyarakat universal. Ketidakbebasan hadir dalam kehidupan masyarakat saat agama menampilkan berbagai hal yang mengancam otonomi manusia dari berbagai sisi kehidupan. Dalam setiap perkembangannya agama, pada satu sisi menghadirkan ketidakbebasan, tetapi di sisi lain menentang ketidakbebasan. Ketidakbebasan dalam agama terjadi ketika timbulnya berbagai gerakan fundamentalisme agama dan aliansi-aliansi teroris yang tersebar.

Keempat, pembangunan: antara tradisi dan modernitas. Dalam kebudayaan tradisional, kebanyakan manusia merasa tertekan dan terpaksa menjalani situasi yang menuntut dengan berbagai sanksi yang telah diwariskan. Kebudayaan tradisional dalam realitas seperti ini menghadirkan ketidakbebasan bagi masyarakat karena berbagai norma dan aturan yang mengekang kebebasan serta biaya kehidupan yang ditanggung dalam kesepakatan di suatu budaya dalam berbagai ritus dan sebagainya yang terkadang berat. Tradisi menjadi ancaman karena berbagai hubungan dengan keterikatan terhadap bentuk-bentuk kesetiaan yang lama, dapat menghalangi perkembangan atau pertumbuhan otonomi. Selain itu pula, budaya tradisional ini dapat digunakan oleh para elite untuk melegitimasi otoritas berkedok kuasa untuk pelayanan sebagai pemimpin.

Sebagai upaya solutif dalam merespons berbagai ancaman ini, terdapat beberapa alternatif yang ditawarkan berdasarkan pemikiran Soedjatmoko. *Pertama*, pendekatan negatif terhadap pembangunan sebagai kebebasan manusia, menjadi pembangunan sebagai peniadaan ketidakbebasan manusia. Dengan pendekatan negatif seperti ini, pembangunan akan terlihat lebih konkret sebagai sebuah aksi yang langsung menyentuh realitas kehidupan masyarakat. Ketidakbebasan ini kemudian diterjemahkan sebagai berbagai penderitaan yang mengganggu seluruh aspek kehidupan manusia. Pembangunan akan dilihat sebagai aksi untuk meniadakan berbagai penderitaan yang dialami oleh manusia. Dengan demikian aksi konkret lebih mudah untuk diwujudkan oleh seluruh manusia.

Kedua, humanitarianisme sebagai aksi solidaritas global. Sebagai konsekuensi pembangunan sangat menekankan sisi kemanusiaan, maka, sebuah paradigma kemanusiaan harus ditawarkan dalam konsep pembangunan agar nilai-nilai kemanusiaan menjadi nilai yang dijunjung tinggi dalam pembangunan yang berlangsung. Humanitarianisme menjadi alternatif yang membawa manusia kepada sebuah paradigma global yang menjunjung tinggi kemanusiaan. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, bahwa kemanusiaan adalah agama universal. Kemanusiaan dapat mempersatukan semua manusia dari berbagai latar belakang secara global. Dengan demikian, gerakan solidaritas dalam rangka upaya memperjuangkan pembangunan dapat berlangsung dalam rasa nilai kemanusiaan.

Ketiga, ciri khas etika politik pembangunan sebagai peniadaan ketidakbebasan. Terdapat beberapa ciri etika pembangunan sebagai peniadaan ketidakbebasan. *Pertama*, manusia harus menjadi titik pangkal dan tujuan dari segala kebijakan pembangunan. Perumusan kebijakan dilakukan agar dapat dijalankan oleh masyarakat. Dengan demikian, kebijakan tidak boleh mengurangi kebebasan manusia atau menghadirkan penderitaan. Kebijakan diambil harus berdasarkan aspek-aspek manusiawi yang harus dihormati dan dijunjung tinggi serta tujuannya harus meniadakan ketidakbebasan, atau setidaknya perlahan secara konstan dan konsisten menanggulangi ketidakbebasan yang telah lama berakar dalam masyarakat. *Kedua*, pembangunan dari bawah atau *bottom-up approach*. Pembangunan mensyaratkan sebuah sasaran yang tepat dalam perencanaan dan dalam upaya bantuan. Pembangunan dari bawah yang berarti pembangunan situasi orang-orang kecil yang minim akan pelayanan sosial dan juga sumber daya. Berbagai bantuan dan rencana pembangunan yang mulai dari bawah akan memberikan gambaran mengenai keberhasilan pembangunan karena langsung menyentuh bagian paling terbawah dari masyarakat sendiri. *Ketiga*, model pembangunan harusnya memprioritaskan orang-orang yang paling menderita sebagai bentuk aksi solidaritas (*Option for the Poor*). Hal mengenai kebutuhan yang paling mendesak adalah perhatian untuk orang-orang yang paling membutuhkan pemenuhan hidup mereka. Akan dikatakan sebagai sebuah ketidakadilan apabila pembangunan hanya menasar kepada orang-orang tertentu yang sesungguhnya sudah secara otonom dapat memenuhi kebutuhannya. Orang-

orang paling menderita ini adalah orang-orang yang hak-haknya tidak terpenuhi dalam standar kebutuhan.

5.2 Saran

5.2.1 Bagi Pemerintah

Pembangunan merupakan ikhtiar politik yang tidak terlepas dari sebuah otoritas yang memimpin jalannya dan haluan dari pembangunan itu. Sebagai sebuah aksi yang terikat dengan politik pula, pembangunan selalu berjalan atas kebijakan dan putusan yang berdasar pada sebuah situasi dan kondisi serta juga bertolak dari berbagai konsensus yang terjadi secara bersama. Dalam hal ini, pemegang otoritas yakni pemerintah yang menjadi penentu arah kebijakan pembangunan. Berbagai pengabdian dan keputusan serta tindakan dari pemerintah adalah sebuah bentuk kepercayaan dari rakyat massal. Oleh karena itu kebijakan dan keputusan untuk pembangunan harus terbuka dan dibuat berdasarkan asas kerakyatan. Tidak ada ketimpangan untuk pelintirkan kebijakan ke arah penyimpangan.

Dalam pandangan Soedjatmoko, pemerintah atau pejabat yang disebutnya sebagai kaum elite harus membangun kedekatan atau kesetiakawanan dengan masyarakat. Aspirasi-aspirasi masyarakat baik yang terlihat dari situasi dan kondisi yang ada maupun yang diserukan langsung harus menjadi referensi dalam mengambil kebijakan. Kedekatan pemerintah dalam bentuk aksi mengutamakan orang-orang kecil serta orang miskin mesti menjadi sebuah kesadaran untuk semakin mengabdikan kepada publik yang dilayani. Selain itu, pendekatan pembangunan yang selalu berasal dari bawah, harus mendulang aspirasi-aspirasi rakyat sebagai praktik demokrasi yang sungguh merakyat.

5.2.2 Bagi Masyarakat

Keterlibatan dalam pembangunan menjadi aksi yang mutlak bagi masyarakat, dalam arti pemahaman tentang pembangunan harus komprehensif dan benar-benar intensif harus dimiliki masyarakat. Masyarakat sendiri harus tahu kalau mereka merupakan pangkal dan tujuan dari pembangunan. Oleh karena itu dalam berbagai kesempatan untuk dapat beraspirasi, masyarakat hendaknya berani masuk dalam ruang penyelewengan dari pembangunan yang terjadi dan dalam

rasa kebersamaan menyampaikan berbagai aspirasi. Pembangunan harus membawa berkat bagi masyarakat. Berbagai ancaman akan ketidakbebasan dalam pembangunan menjadi persoalan pembangunan yang harus segera diselesaikan karena berkaitan dengan manusia itu sendiri. Aliansi masyarakat merupakan kekuatan pembangunan.

Pembangunan niscaya melibatkan banyak kaum dari berbagai kalangan. Dengan demikian, pembangunan harus memperhatikan hak dan keselamatan dari masyarakat sebagai tujuan dan juga yang terlibat langsung di dalamnya. Kemanusiaan menjadi sebuah tujuan dari berbagai aksi pembangunan. Masyarakat harus menjadi agen yang aktif memperjuangkan kemanusiaan, terlepas dari keaktifan dalam aksi pembangunan menuju kesejahteraan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Arndt, H. W. *Pembangunan dan Pemerataan Indonesia pada Masa Orde Baru*. Jakarta: LP3ES, 1987.
- Avonius, Leena dan Damian Kingsbury. *Human Rigts in Asia: A Reassessment of The Asian Values Debate*. New York: Palgrave Macmillan, 2008.
- Berger, Peter L. *Piramida Kurban Manusia, Etika Politik Dan Perubahan Sosial*. Terj. Rahman Tolleng Jakarta: LP3ES, 1982.
- Fulcher, James. *Kapitalisme: Sebuah Pengantar Singkat*. Terj. Leonart Maruli Yogyakarta: Penerbit IRSiSoD, 2021.
- Hisyam, Muhamad. *Krisis Masa Kini dan Orde Baru*. Jakarta: Yayasan Obor, 2003.
- Jebadu, Alexander. *Drakula Abad 21: Membongkar Kejahatan Sistem Ekonomi Pasar Bebas Tanpa Kendali Sebagai Kapitalisme Mutakhir Berhukum Rimba & Ancamannya Terhadap Sistem Ekonomi Pancasila*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2021.
- Madeley, John. *Bisnis Besar-Masyarakat Miskin*. Terj. Alexander Jebadu. Jakarta: PT Gramedia, 2013.
- Madung, Otto Gusti. *Politik Diferensiasi versus Politik Martabat Manusia?*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2011.
- Post-Sekularisme, Toleransi dan Demokrasi*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2017.
- Magnis-Suseno, Franz. *Mencari Sosok Demokrasi-Sebuah Telaah Filosofis*. Jakarta: PT Gramedia, 1995.
- Karl Marx: Dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme*. Jakarta: Gramedia, 2000.
- Mas'oed, Moctar. *Ekonomi dan Struktur Politik Orde Baru 1966-1971*. Jakarta: LP3ES, 1989.
- Müller, Johannes. *Perkembangan Masyarakat Lintas Ilmu*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006.

- Newland, Kathleen dan Kemala Candrakirana. *Menjelajah Cakrawala-Kumpulan Karya Visioner Soedjatmoko*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1994.
- Nursam, M. *Pergumulan Seorang Intelektual-Biografi Soedjatmoko*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2022.
- Sen, Amartya. *Development as Freedom*. New York: Alfred A. Knoff, 2000.
- Sheridan, Greg. *Asian Values Western Dreams: Understanding The New Asia*. Auatsralia: National Library of Australia, 1999.
- Soedjatmoko. *Etika Pembebasan: Pilihan Karangan Tentang Agama, Kebudayaan, Sejarah dan Ilmu Pengetahuan*. Jakarta: LP3ES, 1984.
- *Pembangunan dan Kebebasan*. Jakarta: Penerbit LP3S, 1985.
- *Dimensi Manusia dalam Pembangunan*. Jakarta: Penerbit LP3ES, 1986.
- *Soedjatmoko dan Keprihatinan Masa Depan*. Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya, 1991.
- Soyomukti, Nurani. *Soekarno Otoriter?*. Yogyakarta: Garasi House of Book, 2012.
- Tan, Peter. *Agama Minus Nalar*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2020.
- Winters, Jeffrey A. *Dosa-Dosa Politik Orde Baru*. Terj. Aditya Priyawardhana, Alvin Anwari, dan Sori Siregar. Jakarta: Penerbit Djambatan, 1999.

ARTIKEL DALAM JURNAL

- Chang, William. “Mencari Bahasa Teologi”. *Jurnal Ledalero*, 12:2 Ledalero: Desember 2012.
- Daven, Mathias “Politik Pemusnahan dan Pemusnahan Politik”, dalam Otto Gusti Madung dan John Mansford Prior, ed. *Berani Berhenti Berbohong*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2015.
- Mathias. “Fundamentalisme Agama sebagai Tantangan bagi Negara”, *Jurnal Ledalero*, 15:2 Ledalero, Desember 2016.
- Donnelly, Jack. “Hak Asasi Manusia Nilai-Nilai Asia,” dalam Frans Cuefin. *Hak Asasi Manusia: Aneka Suara dan Pandangan*. Maumere: Ledalero, 2006.
- Farchan, Yusa. “Dinamika Sistem Politik Otoritarianisme Orde Baru”. *Jurnal Adhikari*, 1:3 Bogor: Januari 2022.
- Ferezagia, Debrina Vita. “Analisis Tingkat Kemiskinan di indonesia”. *Jurnal Sosial Humaniora*, 1:1 Bogor: Juli – Desember 2018.

- Hadi, Dwi Wahyono dan Gayung Kasuma. "Propaganda Orde Baru 1966-1980". *Jurnal Verleden*, 1:1 Surabaya: Desember 2012.
- Hayon, Bernardus S. "Pemilu 2009 dan Ujian bagi Kualitas Bernegara". *Jurnal Ledalero*, 7:2 Ledalero: Desember 2008.
- Heinz, Wolfgang S. "Mitos Nilai-Nilai Asia", dalam Frans Ceufin. *Hak-Hak Asasi Manusia*. Maumere: Ledalero, 2006.
- Meo, Reinald L. "Sumbangan Etika Global Hans Kung Demi Terwujudnya Perdamaian dan Relevansinya Bagi Indonesia", dalam Mathias Daven dan Georg Kirchberger, ed. *Hidup-Sebuah Pertanyaan Kenangan 50 Tahun STFK Ledalero*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2019.
- Sen, Amartya. "Democracy As A Universal Value". *Journal Of Democracy*, 10:3 Cambridge: 1999.
- Soeharto. "Amanat Kenegaraan I, 1967-1971" dikutip Dwi Wahyono Hadi dan Gayung Kasuma, "Propaganda Orde Baru 1966-1980". *Jurnal Verleden*, 1:1 Surabaya: Desember, 2012.
- Solikatun dkk. "Kemiskinan dalam Pembangunan". *Jurnal Analisa Sosiologi*. 3:1 Surakarta: April 2014.
- Zuhdi, Susanto dan Muhamad Hisyam. "Kehidupan Demokrasi sampai Orde Baru", dalam, Muhamad Hisyam, peny. *Krisis Masa Kini dan Orde Baru*. Jakarta: Yayasan Obor, 2003.

MANUSKRIP

- Daven, Mathias. "Globalisasi dan Kapitalisme-Refleksi Etis dalam Tegangan antara Pertumbuhan Ekonomi dan Solidaritas" (Materi yang dimodifikasi dari materi ceramah yang dibawakan dalam rangka Hari Studi Sidang Pastoral Post-Natal Keuskupan Ruteng dengan tema Pastoral Ekonomi Berkelanjutan, Ruteng, 10 Januari 2023).

MAJALAH

- M, Arifin dkk. (Majalah Berita Mingguan Tempo), *Apa dan Siapa Sejumlah Orang Indonesia 1983-1984*. Jakarta: PT Grafiti Pers, 1984.
- Siagian, Sabam. "Soedjatmoko: Intelektual yang Dirangsang Komitmen", *Suara Pembaruan*, 22 Desember 1989.

INTERNET

Adriamarthanino, Verelladevanka dan Nibras Nada Nailufar, "Hoogere Burgerschool (HBS), Sekolah Menengah Umum Hindia Belanda", dalam *Kompas.com*, <<https://www.kompas.com/stori/read/2021/10/07/100000979/hoogere-burgerschool-hbs-sekolah-menengah-umum-hindia-belanda?page=all>> diakses pada 13 Januari 2024.

-----"Europeesche Lagere School (ELS) dan perkembangannya", dalam *Kompas.com*, < <https://www.kompas.com/stori/read/2021/10/06/080000979/europeesche-lagere-els-dan-perkembangannya>>, diakses pada 13 Januari 2024.

Hasanah, Mahesti. "Kontestasi Nilai-Nilai Asia dan Hak Asasi Manusia di Indonesia Tahun 1991-1999." *Jurnal PolGov*, 1:2. Yogyakarta: 2019, 299-328. <Url: <https://journal.ugm.ac.id/v3/POLGOV/article/view/5045/1760>> diakses 20 Mei 2024.